

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP
PERALATAN ANESTESI YANG TIDAK LAYAK DIGUNAKAN
TERHADAP PASIEN DI INSTALASI BEDAH SENTRAL
RSUD KOTA MATARAM**



**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP
PERALATAN ANESTESI YANG TIDAK LAYAK DIGUNAKAN
TERHADAP PASIEN DI INSTALASI BEDAH SENTRAL
RSUD KOTA MATARAM**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan**



**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penggunaan peralatan medis yang layak dan sesuai standar merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keselamatan pasien di rumah sakit, terutama pada Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang memerlukan alat anestesi dalam setiap tindakan operasi. Permasalahan muncul ketika peralatan anestesi yang digunakan tidak layak pakai, yang dapat menimbulkan risiko medis serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit sebagai penyedia layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap peralatan anestesi yang tidak layak digunakan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Mataram; dan (2) Bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap peralatan anestesi yang tidak layak digunakan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Mataram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap peralatan anestesi yang tidak layak digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai. RSUD Kota Mataram juga bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan peralatan anestesi yang tidak layak. Jika kelalaian tersebut merugikan pasien, rumah sakit dapat dikenai sanksi perdata, pidana, administratif, dan etik. Oleh karena itu, rumah sakit wajib memastikan semua alat medis aman, layak, dan sesuai standar demi menjaga keselamatan pasien.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem manajemen peralatan medis, peningkatan kompetensi teknisi medis, serta penegakan standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kelayakan alat anestesi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum rumah sakit dapat diimplementasikan secara optimal demi perlindungan pasien dan kepatuhan terhadap hukum kesehatan.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, rumah sakit, peralatan anestesi, Instalasi Bedah Sentral, kelayakan alat medis

ABSTRACT

The use of proper and standardized medical equipment is a crucial aspect in ensuring patient safety in hospitals, particularly in the Central Surgery Installation (Instalasi Bedah Sentral/IBS), where anesthesia equipment is essential for every surgical procedure. Problems arise when anesthesia equipment used is unfit for use, potentially causing medical risks and legal consequences for the hospital as a healthcare provider. This study aims to examine: (1) How the legal responsibility of hospitals is regulated regarding unfit anesthesia equipment used in the Central Surgery Installation of RSUD Kota Mataram; and (2) How such legal responsibility is implemented in practice.

This research employs a sociological juridical approach. The juridical approach is used to analyze legal aspects related to hospital liability concerning unfit anesthesia equipment. The findings indicate that the legal responsibility of hospitals is regulated under the Indonesian Minister of Health Regulation No. 15 of 2023 on Medical Equipment Maintenance in Healthcare Facilities, Article 2 paragraph 1, which states that all medical equipment used in healthcare facilities must function properly and comply with service standards, quality requirements, safety, efficacy, and usability. RSUD Kota Mataram is legally responsible for the use of unfit anesthesia equipment. If negligence causes harm to patients, the hospital may be subject to civil, criminal, administrative, and ethical sanctions. Therefore, hospitals are obligated to ensure that all medical devices are safe, functional, and meet the required standards to safeguard patient safety.

This study recommends strengthening medical equipment management systems, enhancing the competence of medical technicians, and enforcing standard operating procedures (SOPs) to ensure the eligibility of anesthesia devices. Thus, hospital legal responsibility can be optimally implemented to protect patients and ensure compliance with health law.

Keywords: legal responsibility, hospital, anesthesia equipment, Central Surgery Installation, medical equipment feasibility